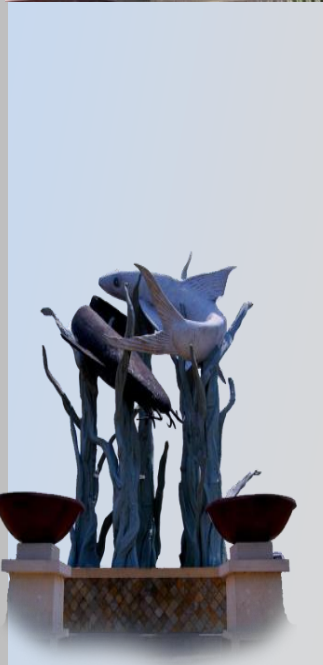


RENJA



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. KHA. Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62214

Telp. (0322) 321414 Fax : 322603

Web Site : bapenda.kablamongan.go.id

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KHA. Dahlan No. 01 ☎ Kode pos 62214
Telp. (0322) 321414 E-Mail: bapenda@lamongan.go.id, Web site : bapenda.lamongankab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmad dan petunjukNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 ini sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang. Akhimya penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan Allah SWT, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, 29 April 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN


PUJOBROTO IRIAWAN PUTRA, SE. MM. M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691008 199503 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 8

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah13

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 30

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 30

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja OPD 31

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan 37

BAB IV PENUTUP..... 40



**RANCANGAN KERJA PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun berdasarkan analisa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Bidang-bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri yang disesuaikan dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2025;

3. Menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V : PENUTUP



**RANCANGAN KERJA PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan serta untuk mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2023 relatif baik dibandingkan pada tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025 dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dinas/instansi yang bersangkutan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pada Tahun 2024 total anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp17.666.541.439,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 (dua) program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp16.459.885.382,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,17%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN LAMONGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tribulan 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Bapenda	84,58	13.185.457.439	90,07	12.316.674.359	90,07	18.268.089.519	0	3.064.700.821	0%	17%	90,07	15.381.375.180	106,5%	117%	Badan Pendapatan Daerah	
2	5 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi PD yang Tersusun	6 dokumen	75.000.000	6 dokumen	73.373.911	6 dokumen	65.963.000	8 Dokumen	5.238.300	133%	8%	14 Dokumen	78.612.211	150,0%	105%		
3	5 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	19.634.000	2 Dokumen	15.080.000	5 Dokumen	5.238.300,00	250%	35%	7 Dokumen	24.872.300	200,0%	124%		
4	5 02 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	53.739.911	4 Laporan	50.883.000	3 laporan	0	75%	0%	7 Laporan	53.739.911	125,0%	98%		
5	5 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD yang Tersusun	8 laporan	11.586.542.864	8 laporan	10.752.710.653	8 laporan	16.437.961.019	4 Laporan	2.841.621.496	50%	17%	12 Laporan	13.594.332.149	87,5%	117%		
6	5 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	11.546.490.864	43 Orang/Bulan	10.713.203.053	43 Orang/Bulan	16.393.628.218,60	43 Orang/Bulan	2.827.989.096,00	100%	17%	43 orang/bulan	13.541.192.149	100,0%	117%		
7	5 02 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	20.052.000	4 Laporan	19.540.800	4 Laporan	18.134.100	3 laporan	0	75%	0%	7 Laporan	19.540.800	75,0%	97%		
8	5 02 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	19.966.800	4 Laporan	26.198.700	1 Laporan	13.632.400,00	25%	52%	5 Laporan	33.599.200	100,0%	168%		
9	5 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi	100%	144.717.900	100%	137.064.000	100%	184.446.200	100%	2.032.400	100%	1,1%	100%	139.096.400	100,0%	96%		
10	5 02 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan/Penerangan Bantuan Kantor yang disediakan	1 Paket	8.234.000	1 Paket	8.230.300	1 Paket	7.980.000	1 Paket	2.032.400,00	100%	25%	2 Paket	10.262.700	100,0%	125%		
11	5 02 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.541.000	1 Paket	11.450.000	1 Paket	6.490.200	0	0	0%	0%	1 Paket	11.450.000	100,0%	99%		
12	5 02 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	56.765.700	3 paket	52.739.400	3 paket	64.923.000	0	0	0%	0%	3 Paket	52.739.400	100,0%	93%		
13	5 02 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.641.200	1 Paket	22.261.300	1 Paket	31.852.000	0	0	0%	0%	1 Paket	22.261.300	100,0%	94%		
14	5 02 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	14.539.000	3 dokumen	13.680.000	3 dokumen	14.523.000	0	0	0%	0%	3 Dokumen	13.680.000	100,0%	94%		
15	5 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	29.997.000	4 laporan	28.703.000	4 laporan	58.678.000	0	0	0%	0%	4 Laporan	28.703.000	100,0%	96%		
16	5 02 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	15 unit	49.866.000	15 unit	47.870.000	12 unit	299.168.400	0	0	0%	0%	15 unit	47.870.000	100,0%	96%		
17	5 02 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang	3 unit	10.131.000	3 unit	9.570.000	0	0	0	0	0%	0	3 unit	9.570.000	100,0%	94%		
18	5 02 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	39.735.000	12 unit	38.300.000	12 unit	299.168.400	0	0	0%	0%	12 unit	38.300.000	100,0%	96%		
19	5 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 laporan	1.050.625.675,00	100%	1.031.728.339,00	16 laporan	992.303.900,00	1 Laporan	157.885.625,00	6%	16%	16 Laporan	1.189.613.964	100,0%	113%		
20	5 02 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.600.000	4 Laporan	4.592.000	4 Laporan	4.592.000	0	0	0%	0%	4 Laporan	4.592.000	100,0%	100%		
21	5 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	449.872.275	4 Laporan	448.958.535	4 Laporan	363.200.000	0	0	0%	0%	4 Laporan	448.958.535	100,0%	100%		
22	5 02 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.185.400,00	4 Laporan	5.497.400	4 Laporan	185.823.900,00	0	0	0%	0%	4 Laporan	5.497.400	100,0%	54%		
23	5 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	585.968.000	4 Laporan	572.680.404	4 Laporan	438.688.000	1 Laporan	157.885.625,00	25%	36%	4 Laporan	730.566.029	100,0%	125%		

24	5 02 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	76 Unit	268.705.000	76 Unit	264.168.362	76 unit	278.247.000	18 unit	57.923.000	24%	21%	109 unit	322.091.362	143,4%	120%
25	5 02 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	22.500.000	25 Unit	18.305.800	25 Unit	19.988.000	0	0	0%	0%	25 unit	18.305.800	100,0%	81%
26	5 02 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	205.009.000	25 Unit	204.969.000	25 Unit	228.859.000	3 unit	51.700.000,00	12%	23%	28 unit	256.669.000	100,0%	125%
27	5 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	15.000.000	58 Unit	14.993.000	58 Unit	15.000.000	1 unit	3.823.000	24%	25%	59 unit	18.816.000	100,0%	125%
28	5 02 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.196.000	1 Unit	25.900.562	1 Unit	14.400.000	1 Unit	2.400.000	100%	17%	1 unit	28.300.562	100,0%	108%
29	5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,53%	800.513.000	0,92%	774.537.403	1,00%	880.100.815	1,05%	19.140.000	105%	2%	1,05%	793.677.403	198,1%	99%
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,28%	3.198.347.000	10,83%	2.927.173.420	5,39%	3.231.973.356	69,56%	13.290.000	1291%	0%	69,56%	2.940.463.420	2120,7%	92%
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD	1,88%	482.224.000	4,35%	441.500.200	4,35%	490.810.000	-6,40%	57.862.700	-147%	12%	-6,40%	499.362.900	-340,4%	104%
30	5 02 04 2 01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun	4 Dokumen	800.513.000	4 dokumen	774.537.403	4 dokumen	880.100.815	1 Dokumen	19.140.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.403	100,0%	99%
			Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia	15 Jenis	3.198.347.000	15 jenis	2.927.173.420	15 jenis	3.231.973.356	2 jenis	13.290.000	40%	0%	17 Jenis	2.940.463.420	100,0%	92%
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun	12 Laporan	482.224.000	12 laporan	441.500.200	12 laporan	490.810.000	3 laporan	57.862.700	25%	12%	15 Laporan	499.362.900	100,0%	104%
31	5 02 04 2 01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	13.940.000	1 dokumen	1.640.000	1 Dokumen	1.640.000,00	100%	100%	5 Dokumen	15.580.000	100,0%	104%
32	5 02 04 2 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	15.000.000	4 dokumen	14.646.450	1 dokumen	1.230.000	0	0	0%	0%	4 Dokumen	14.646.450	100,0%	98%
33	5 02 04 2 01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	42.513.000	4 laporan	37.250.000	1 Laporan	138.228.000	0	0	0%	0%	4 Laporan	37.250.000	100,0%	88%
34	5 02 04 2 01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Unit	66.150.000	11 unit	65.447.600	11 unit	29.953.000	0	0	0%	0%	11 Unit	65.447.600	100,0%	99%
35	5 02 04 2 01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	158.000.000	4 laporan	148.582.003	1 Laporan	53.584.000,00	0	0	0%	0%	4 Laporan	148.582.003	100,0%	94%
36	5 02 04 2 01 06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 laporan	10.000.000	4 laporan	9.812.400	1 Laporan	103.978.815,00	0	0	0%	0%	4 laporan	9.812.400	100,0%	98%
37	5 02 04 2 01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	850.000 objek pajak	20.000.000	850.000 objek pajak	19.785.750	850.000 objek pajak	1.440.000	0	0	0%	0%	850.000 objek pajak	19.785.750	100,0%	99%
38	5 02 04 2 01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	540.000.000	4 dokumen	530.520.800	1 dokumen	580.000.000,00	0	17.500.000,00	0%	3%	4 Dokumen	548.020.800	100,0%	101%
39	5 02 04 2 01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 Layanan	103.850.000	6 layanan	100.420.000	11 layanan	161.795.800	2 layanan	3.500.000,00	18%	2%	8 Layanan	103.920.000	100,0%	100%
40	5 02 04 2 01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	50.000.000	4 dokumen	47.835.700	4 dokumen	62.766.000	1 Dokumen	4.622.700,00	25%	7%	5 Dokumen	52.458.400	100,0%	105%
41	5 02 04 2 01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	4 Dokumen	3.013.347.000	4 dokumen	2.746.785.820	4 dokumen	3.029.664.556	1 Dokumen	9.790.000,00	25%	0%	5 Dokumen	2.756.575.820	100,0%	91%
42	5 02 04 2 01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	15.000.000	4 dokumen	14.520.000	4 dokumen	10.560.000,00	0	0	0%	0%	4 Dokumen	14.520.000	100,0%	97%
43	5 02 04 2 01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	90.000.000	4 dokumen	64.125.000	4 dokumen	54.620.000	1 Dokumen	3.840.000,00	25%	7%	5 Dokumen	67.965.000	100,0%	76%
44	5 02 04 2 01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dan Retribusi Daerah	4 Laporan	342.224.000	4 laporan	329.539.500	4 Laporan	373.424.000,00	1 Laporan	49.400.000,00	25%	13%	5 Laporan	378.939.500	100,0%	111%
45	5 02 04 2 01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	10.000.000	2 laporan	9.759.094	1 Laporan	10.000.000	0	0	0%	0%	2 Laporan	9.759.094	200,0%	98%

24	5 02 01 2 06	Pemeliharaan Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	76 Unit	266.795.000	76 Unit	264.188.362	76 unit	278.347.800	10 unit	67.823.000	34%	31%	109 unit	322.091.382	143,4%	129%
25	5 02 01 2 08 01	Pemeliharaan Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	Jumlah Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	25 Unit	22.500.000	25 Unit	18.305.800	25 Unit	19.998.000	0	0	0%	0%	25 unit	18.305.800	100,0%	81%
26	5 02 01 2 08 02	Pemeliharaan Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	Jumlah Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	25 Unit	205.008.000	25 Unit	204.969.000	25 Unit	228.810.000	3 unit	61.700.000.00	12%	23%	28 unit	296.089.800	100,0%	129%
27	5 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	Jumlah Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	56 Unit	15.000.000	56 Unit	14.993.000	56 Unit	15.000.000	1 unit	3.823.000	24%	28%	59 unit	18.816.000	100,0%	129%
28	5 02 01 2 09 08	Pemeliharaan Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	Jumlah Bangun Bina Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kelas Dikawatir	1 Unit	25.196.000	1 Unit	25.905.562	1 Unit	14.400.000	1 Unit	2.400.000	100%	17%	1 unit	25.398.562	100,0%	100%
29	5 02 04	Program Penggajian Pegawai Daerah	Persentase Penggajian Pegawai Daerah	8,52%	880.513.000	8,52%	774.537.493	1,88%	880.105.816	1,88%	18.145.000	100%	2%	1,88%	793.677.493	100,1%	99%
30	5 02 04 2 01	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
31	5 02 04 2 01 01	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
32	5 02 04 2 01 02	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
33	5 02 04 2 01 03	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
34	5 02 04 2 01 04	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
35	5 02 04 2 01 05	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
36	5 02 04 2 01 06	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
37	5 02 04 2 01 07	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
38	5 02 04 2 01 08	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
39	5 02 04 2 01 09	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
40	5 02 04 2 01 10	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
41	5 02 04 2 01 11	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
42	5 02 04 2 01 12	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
43	5 02 04 2 01 13	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
44	5 02 04 2 01 14	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%
45	5 02 04 2 01 15	Penghasilan Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen Penghasilan Pegawai Daerah	4 Dokumen	880.513.000	4 dokumen	774.537.493	4 dokumen	880.105.816	1 Dokumen	18.145.000	25%	2%	5 Dokumen	793.677.493	100,0%	99%

Lamongan, 29 April 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pujo Broto Irawan Putra, SE., M.M., M.Kes.

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 7

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1) **Urusan Keuangan ,**

Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 dilaksanakan 1 (satu) program pembangunan yaitu : Pengelolaan Pendapatan Daerah, terealisasi 90,39%.

2) **Urusan Pendukung.**

Untuk mencapai sasaran Tahun 2023 dilaksanakan 1 (satu) program pendukung yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi 89,58%;

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2023, tersedia dana sebesar Rp20.436.222.900.00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2023, dari dana tersebut di atas telah terealisasi sebesar Rp18.357.314.786,00 atau **89,83%** identik dengan skala pengukuran ordinal adalah **Sangat Baik/Sangat Berhasil**.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna menyeimbangkan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah dilaksanakan selama ini melalui berbagai tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan pertama adalah pelaksanaan musyawarah pembangunan di tingkat paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa. Selanjutnya dari usulan di tingkat Desa di bahas di tingkat Kecamatan. Usulan pembangunan di tingkat Kecamatan selanjutnya dibahas di tingkat Kabupaten melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten dalam rangka memadukan dan menyelaraskan agar diperoleh perencanaan yang aspiratif, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan, dimana sebelumnya telah diadakan kegiatan Forum Satuan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka sinkronisasi usulan pembangunan yang bersifat top-down.

Hasil dari kegiatan musrenbang tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lamongan, yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan keuangan,

program dari Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dari urusan yang tertuang dalam RKPD selanjutnya disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD, selanjutnya disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian diadakan pembahasan dengan DPRD dan ditetapkan menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang digunakan dasar penyusunan APBD.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana terdapat perluasan obyek pajak daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Perluasan pajak daerah dilakukan dengan memperluas pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Sedangkan untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, hal ini mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang dipergunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam upaya peningkatan pendapatan diupayakan agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan meliputi :
 - a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi :
 - a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi;
 - b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
 - c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;

- d. Dana bagi hasil retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- e. Dana bagi hasil lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : **“Melaksanakan Kewenangan Urusan Keuangan dibidang Pendapatan Daerah”**. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan;
4. Bidang Pelayanan dan Penagihan;
5. Bidang Pengawasan dan Pelaporan;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki personil dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah diuraikan di atas, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan organisasi. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Thn 2025	Thn 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak			0,51%	0,52%	0,53%	0,54%	4,20%	0,92%	1%	1,01%	
2	Persentase Peningkatan Pajak Daerah			3,26%	3,27%	3,28%	3,29%	3,96%	10,83%	5,39%	5,63%	
3	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya			1,86%	1,87%	1,88%	1,89%	4,19%	4,35%	4,35%	4,36%	

Kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2023 tercapai 102,13% di atas target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari sektor Pajak Daerah terealisasi sebesar 98,18%, dari sektor Retribusi Daerah sebesar 91,63%, dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 101,74%, dan dari sektor Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 104,92%.

Penerimaan dari masing-masing sektor tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sektor pajak daerah terealisasi sebesar Rp160.188.575.701,56 atau sebesar 98,18% dari target Rp163.163.536.500,00. Realisasi ini meningkat sebesar 3,96% bila dibanding tahun sebelumnya. Dari 11 jenis pajak daerah terdapat 8 jenis pajak daerah mengalami peningkatan, antara lain : Pajak Hotel meningkat sebesar 34,64%, Pajak Restoran meningkat sebesar 52,14%, Pajak Hiburan meningkat sebesar 177,27%, Pajak Penerangan Jalan meningkat sebesar 17,12%, Pajak Parkir meningkat sebesar 41,31%, Pajak Air Tanah meningkat sebesar 8,72%, BPHTB meningkat sebesar 21,65%, dan Pajak Sarang Burung meningkat sebesar 504,74%. Sedangkan 3 jenis pajak daerah lainnya mengalami penurunan, antara lain : Pajak Reklame menurun sebesar -13,66%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurun sebesar -1,26%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurun sebesar -12,29%.
- b. Sektor retribusi daerah terealisasi sebesar Rp18.748.931.531 atau sebesar 91,47% dari target Rp20.535.686.700 Realisasi ini menurun sebesar -20,42% bila dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari 13 jenis retribusi daerah terdapat 9 jenis retribusi daerah mengalami peningkatan, antara lain : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meningkat sebesar 34,44%, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi meningkat sebesar 1,70%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meningkat sebesar 13,23%, Retribusi Tempat Pelelangan meningkat sebesar 380,83%, Retribusi Terminal meningkat sebesar 10,94%, Retribusi Rumah Potong Hewan meningkat sebesar 25,09%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meningkat sebesar 23,60%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meningkat sebesar 294,80%, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meningkat sebesar 15,13%. Sedangkan 4 jenis retribusi daerah lainnya mengalami penurunan antara lain : Retribusi Pelayanan Kesehatan menurun sebesar -99,36%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurun sebesar -0,23%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurun sebesar -16,43%, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar 0% atau tidak ada peningkatan maupun penurunan.
- c. Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp17.199.695.333,86 atau sebesar 75,25% dari target Rp22.855.892.314 Realisasi ini meningkat sebesar 10,31% bila dibanding tahun sebelumnya. Dari 7 Dividen BUMD terdapat 6 dividen BUMD yang mengalami peningkatan, antara lain ; PT. Bank Jatim meningkat sebesar 1,88%, Aneka Usaha Lamongan Jaya meningkat sebesar 7,69%, PD Pasar Lamongan meningkat sebesar 24,09%, PDAM meningkat sebesar 138,11%, PD. Bank Daerah meningkat sebesar 20,79%, dan PT. Wisata Bahari Lamongan meningkat

sebesar 50%. Sedangkan dividen BUMD mengalami penurunan yakni: Lamongan Integrated Shorebase menurun sebesar -35,74%.

- d. Lain-Lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp323.445.671.372,01 atau sebesar 104,70% dari target Rp311.656.460.000. Realisasi ini meningkat sebesar 2,98% bila dibanding tahun sebelumnya. Dari 10 jenis Lain-Lain PAD yang Sah, terdapat 4 jenis Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan antara lain Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan meningkat sebesar 63,89%, Jasa Giro meningkat sebesar 2,22%, Pendapatan Denda Pajak Daerah meningkat sebesar 61,79%, Pendapatan BLUD meningkat sebesar 3,44%, sedangkan 4 jenis Lain-Lain PAD yang Sah lainnya mengalami penurunan yakni, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan menurun sebesar -91,79%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0% sehingga tidak ada realisasi, serta Pendapatan dan Pengembalian Lainnya menurun sebesar -99%, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP menurun sebesar 100%. Terdapat 2 jenis Lain-Lain PAD yang Sah tidak mengalami penurunan maupun peningkatan karena realisasinya sama antara tahun 2022 dan 2023 antara lain Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dan Hasil Kerja Sama Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis. Hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan sebagian kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Melalui peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil dan sarana prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui obyek pajak daerah dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung melalui pemanfaatan; penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tahun 2025 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan ke Bapenda, sehingga Renja Bapenda tahun 2025 murni merupakan program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai Renstra Bapenda Tahun 2021-2026 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah

[illegible]



**RANCANGAN KERJA PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional dan Provinsi dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang dipadukan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 terutama keterpaduan dalam program dan kegiatan serta sasaran target yang akan dicapai.

Badan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah mengarah pada Perumusan Kebijakan dan koordinasi yang selaras dengan Prioritas Nasional, antara lain :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, selaras dengan isu strategis penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI);
4. Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan energi baru terbarukan;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarustamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
5. Percepatan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
6. Penetapan dan penerbitan pajak daerah; dan
7. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan pada visi Kabupaten Lamongan, yaitu :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan. Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat.

Adapun untuk Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan : “Percepatan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif”.

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **Tujuan**

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja pemerintah sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :
“Meningkatkanya Kemandirian Keuangan Daerah”.

➤ **Sasaran**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”.

Table 3.1
Perbandingan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

No	RKPD Tahun 2025				Perubahan RKPD Tahun 2025			Pagu Program	Selisih (Bertambah/Berkurang)	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Satuan	Pagu Program	Urusan/Program	Indikator	Target dan Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-5	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Bapenda	90,07	14.390.875.595	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Bapenda	90,07	18.268.089.519	3.877.213.924	Efisiensi Anggaran	Badan Pendapatan Daerah
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi PD yang Tersusun	6 dokumen	105.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi PD yang Tersusun	6 dokumen	65.963.000	-39.037.000		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.080.000	-14.920.000		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.883.000	-24.117.000		
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD yang Tersusun	8 laporan	12.379.838.595	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD yang Tersusun	8 laporan	16.437.961.019	4.058.122.424		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	12.320.808.395,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	16.393.628.218,60	4.072.819.824		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	29.030.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	18.134.100	-10.895.900		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	30.000.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	26.198.700	-3.801.500		
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian y	100%	61.795.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	0%	0	-61.795.000		
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	61.795.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-61.795.000		
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi	100%	310.894.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi	100%	184.446.200	-126.448.400		
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan/Penerangan Bantuan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.685.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan/Penerangan Bantuan Kantor yang disediakan	1 Paket	7.980.000	-2.705.400		
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.568.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.490.200	-15.077.800		
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	64.923.000	-10.077.000		
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1 Paket	53.641.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.852.000	-21.789.200		
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	14.523.000	-10.477.000		

17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	58.678.000	-66.322.000
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	15 unit	395.099.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	12 unit	299.168.400	-95.930.600
19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	26.784.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-26.784.000
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	368.315.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	299.168.400	-69.146.600
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 laporan	673.953.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 laporan	992.303.900,00	318.350.500
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.592.000	-8.000
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	53.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	363.200.000	310.000.000
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	30.185.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	185.823.900,00	155.638.500
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	585.968.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	438.688.000	-147.280.000
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	76 unit	340.009.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	76 unit	278.247.000	-61.762.000
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	19.988.000	-12.000
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	225.009.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	228.859.000	3.850.000
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000	-5.000.000
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.400.000	-60.600.000
31	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,54%	1.662.000.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	1,00%	880.100.815	-781.899.185
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,29%	4.471.347.200		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,39%	3.231.973.356	-1.239.373.844
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	1,89%	766.403.800		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	4,35%	490.810.000	-275.593.800

32	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun	4 dokumen	1.662.000.000,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun	4 dokumen	880.100.815	-781.899.185
		Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia	15 jenis	4.471.347.200		Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia	15 jenis	3.231.973.356	-1.239.373.844
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun	12 laporan	766.403.800		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun	12 laporan	490.810.000	-275.593.800
33	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	75.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1.640.000	-73.360.000
34	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1.230.000	-48.770.000
35	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	150.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	138.228.000	-11.772.000
36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 unit	66.150.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 unit	29.953.000	-36.197.000
37	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	407.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	53.584.000,00	-353.416.000
38	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	50.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	103.978.815,00	53.978.815
39	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	850.000 objek pajak	350.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	850.000 objek pajak	1.440.000	-348.560.000
40	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	580.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	580.000.000,00	0
41	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 layanan	1.013.850.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 layanan	161.795.800	-852.054.200
42	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 dokumen	100.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 dokumen	62.766.000	-37.234.000
43	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen	3.356.347.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen	3.029.664.556	-326.682.444
44	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	35.000.200,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	10.560.000,00	-24.440.200
45	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	305.742.200	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	54.620.000	-251.122.200
46	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	360.661.600	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	373.424.000,00	12.762.400
47	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	124.286.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	10.000.000	-114.286.000

32	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penelitian yang Tersusun	4 dokumen	1.662.000.000,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penelitian yang Tersusun	4 dokumen	880.100.815	-781.899.185
		Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia	19 jenis	4.471.347.200		Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia	19 jenis	3.231.973.396	-1.239.373.804
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun	12 laporan	766.403.800		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun	12 laporan	499.816.606	-275.587.194
33	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	75.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1.640.000	-73.360.000
34	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1.230.000	-48.770.000
35	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	150.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	138.228.000	-11.772.000
36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 unit	66.150.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 unit	29.953.000	-36.197.000
37	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	407.000.000,00	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	53.564.000,00	-353.436.000
38	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	50.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	103.978.815,00	53.978.815
39	Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diterima NJOPI nya	850.000 objek pajak	350.000.000	Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diterima NJOPI nya	850.000 objek pajak	1.440.000	-348.580.000
40	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	580.000.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	580.000.000,00	0
41	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 layanan	1.013.850.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 layanan	161.793.800	-852.056.200
42	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 dokumen	100.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 dokumen	42.768.000	-57.232.000
43	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen	3.356.347.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen	3.029.664.556	-326.682.444
44	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	35.000.200,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	10.560.000,00	-24.440.200
45	Pengendalian, Pemertiksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemertiksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	305.742.200	Pengendalian, Pemertiksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemertiksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	54.620.000	-251.122.200
46	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	360.661.600	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	373.424.000,00	12.762.400
47	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	124.206.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	10.000.000	-114.206.000

Lamongan, 29 April 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pujo Broto Iriawan Putra, SE., M.M., M.Kes.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan, yakni sebanyak 2 program dan 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan/sub kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1. Pengadaan Meubel;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, dengan kegiatan/sub kegiatan :

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah;
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah



**RANCANGAN KERJA PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk implementasi Renstra dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan.

Fungsi lain dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari Badan Pendapatan Daerah, sampai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebagai bahan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan secara simultan harus segera memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemutakhiran data (*updating data*) atas wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
2. Melaksanakan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah melalui media cetak maupun elektronik;
3. Meningkatkan kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah melalui Pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait dengan perpajakan dan retribusi daerah
4. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
5. Peningkatan digitalisasi pembayaran pajak daerah secara masif.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 disamping itu juga Perubahan Renja Tahun 2025 ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Penyusunan Renja ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Lamongan, 29 April 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pujo Broto Irawan Putra, SE., M.M., M.Kes.

